



Buletin

Parlementaria

Nomor 1017/IV/VII/2018 • Juli 2018



DPR Dorong Gresik Ciptakan Kawasan Pangan Mandiri

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN



9 772614 339005

Sistem Keamanan Asian Games Palembang Sangat Baik



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam acara Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI

DPR Dorong Gresik Ciptakan Kawasan Pangan Mandiri

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, untuk menciptakan kawasan pangan mandiri. Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah yang telah mencanangkan kawasan pangan mandiri, sebagai salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan. Potensi pembangunan ini dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat.

“Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gresik, yang mendukung prinsip-prinsip pencapaian pangan mandiri,” kata Bamsuet, sapaan akrabnya, dalam acara Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI dengan tema ‘Potensi

Pembangunan Kabupaten Gresik Melalui Pangan Mandiri, Dunia Usaha, Dan Wisata’, di Surabaya, Jatim, Jum’at (13/7).

Prinsip tersebut, lanjut Bamsuet, antara lain adalah kemandirian yang menolak segala ketergantungan dari pihak lain, serta memaksimalkan kemampuan sendiri dalam mencapai tujuan, kecukupan

Sektor yang memiliki peranan besar dalam perekonomian di Kabupaten Gresik memang adalah dari sektor industri, karena industri tersebut cukup banyak dan menyerap tenaga kerja. Namun jangan dipungkiri bahwa Kabupaten Gresik juga memiliki potensi dari sektor pertanian, sektor dunia usaha, dan sektor pariwisata

ekonomi, partisipatif sebagai pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat, transparan dan kredibel.

Menurutnya, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut pada kebijakan yang dirumuskan, maka diharapkan pembangunan di Kabupaten Gresik dapat memaksimalkan potensi pembangunan melalui pangan mandiri.

“Selain itu kita jangan mengesampingkan bahwa masih terdapat potensi lain yang bisa dikembangkan di sini. Karena Gresik memiliki potensi yang cukup besar dari sektor pariwisata dan dunia usaha,” tandas Bamsuet.

Politisi Partai Golkar itu menilai, potensi pembangunan Kabupaten Gresik, jangan hanya dilihat dari pembangunan fisik semata, tetapi harus dilihat juga dari potensi-potensi lainnya.

“Sektor yang memiliki peranan besar dalam perekonomian di Kabupaten Gresik memang dari sektor industri, karena industri tersebut cukup banyak dan menyerap tenaga kerja. Namun jangan dipungkiri bahwa Kabupaten Gresik juga memiliki potensi dari sektor pertanian, sektor dunia usaha, dan sektor pariwisata,” kata Bamsuet.

Bamsuet mengatakan, sebagai Kota Santri, Gresik dapat mengembangkan potensi wisata religi dengan menelusuri jejak-jejak peninggalan Wali Songo. Selain itu Gresik juga memiliki potensi wilayah panorama alam, seperti Pulau Bawean, Pantai Delekan, dan lainnya yang sayang jika tidak dikembangkan lebih baik bagi.

Sejalan dengan pembangunan potensi pariwisata tersebut, tambah Bamsuet, maka terdapat pula potensi pembangunan dari dunia usaha, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Ia berharap Pemkab Gresik sebagai penentu kebijakan dapat mengarahkan UKM yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan, dan peningkatan daya saing.

“Dengan pembangunan potensi wisata dan potensi dunia usaha yang selaras, saya berkeyakinan Gresik dapat tumbuh menjadi kabupaten yang maju dan bersaing dengan kabupaten lain dari seluruh wilayah Indonesia,” tegas mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.

Dalam kesempatan tersebut, Bamsuet menyampaikan bahwa DPR berkeinginan untuk terus membangun komunikasi yang positif dengan masyarakat. Tujuannya tidak lain adalah semata agar masyarakat dapat menerima informasi dan perkembangan pembangunan yang

sedang berlangsung. Pers memiliki kesempatan untuk meliput potensi-potensi pembangunan tersebut.

“Hal ini sejalan dengan fungsi pers untuk menyiarkan informasi kepada khalayak, serta perannya sebagai kontrol sosial kepada pemerintah, agar dapat tetap berjalan dalam koridor konstitusi,” kata Bamsuet, yang juga mantan wartawan itu.

Dengan potensi-potensi pembangunan yang ada di Kabupaten Gresik dan dukungan dari DPR RI serta pemerintah termasuk pemerintah daerah, serta apresiasi dari rekan-rekan media, Bamsuet merasa yakin dan percaya bahwa Kabupaten Gresik dapat mewujudkan pembangunan yang adil, sejahtera, dan berkualitas.

Press Gathering ini diikuti lebih dari 100 wartawan dari media cetak, media elektronik dan media siber yang tergabung dalam Wartawan Koordinatoriat DPR RI. Hadir dalam acara ini sejumlah Anggota DPR RI, diantaranya Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi (F-PAN), Wakil Ketua Baleg DPR RI Dossy Iskandar Prasetyo (F-Hanura), Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi (F-Gerindra), Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun (F-PG), dan Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (F-Nasdem).

Selain itu kita jangan mengesampingkan bahwa masih terdapat potensi lain yang bisa dikembangkan di sini. Karena Gresik memiliki potensi yang cukup besar dari sektor pariwisata dan dunia usaha

Selain itu, hadir juga Bupati Gresik Sambari Halim Radianto beserta jajaran, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perwakilan Kementerian Pertanian, perwakilan Kementerian Perdagangan, serta sejumlah pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Diantaranya Sekjen DPR RI Indra Iskandar, Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha, Deputy Persidangan DPR RI Damayanti, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI Y.O.I Tahapari, serta perwakilan dari Setjen MPR RI dan Setjen DPD RI. ■ dep/ff



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Pemberitaan)
PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Sofyan Efendi
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
ANGGOTA REDAKSI
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,
Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske
Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,
Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,
Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,
Azka Restu Fadilah
ADMINISTRASI
Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher, GERALDI OPIE
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen
DESAIN GRAFIS
Dito Sugito
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,
PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Foto: jayadi/od

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima Wakil Ketua Parlemen Bahrain Abdulhalim Abdulla Ahmed Murad di Gedung DPR RI

DPR Harap Bahrain Perluas Kerja Sama Dengan Indonesia

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyambut hangat berbagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Bahrain di Indonesia. Sebagai sesama negara berpenduduk muslim, Indonesia sangat terbuka dalam membangun hubungan sosial dengan negara-negara timur tengah.

“ Saya sangat mengapresiasi kunjungan delegasi Bahrain ke Indonesia untuk meresmikan berbagai masjid di Bekasi, Bandung dan Bogor, serta untuk memberikan bantuan sosial ke berbagai panti asuhan. Berbagai bentuk kegiatan sosial tersebut tak hanya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia saja, tetapi juga akan mempererat hubungan antara negara Indonesia dengan Bahrain,” ujar Bamsuet, sapaan akrabnya, saat menerima Wakil Ketua Parlemen Bahrain Abdulhalim Abdulla Ahmed Murad di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7).

Politisi Partai Golkar ini memandang hubungan sosial Indonesia - Bahrain yang sudah terjalin baik selama ini bisa ditingkatkan ke bidang lainnya, seperti politik, ekonomi dan pertahanan

keamanan. Potensi perdagangan kedua negara sangat besar, sehingga perlu berbagai pertemuan dan dialog agar bisa terbangun kesepahaman.

“Indonesia memandang Bahrain sebagai mitra strategis yang bisa dijadikan sebagai pintu masuk produk Indonesia ke berbagai negara Timur Tengah, Teluk, dan Afrika Utara. Sampai dengan akhir tahun 2017, nilai total perdagangan kedua negara mencapai USD 206.308 juta dengan nilai ekspor Indonesia yang masih relatif kecil yaitu sebesar USD 47.348 juta. Dengan kunjungan ini, saya harap Parlemen Bahrain dapat membantu memberikan kemudahan bagi masuknya berbagai produk Indonesia kesana,” terang Bamsuet.

Bamsuet juga menginginkan hubungan *people to people* antar

warga Indonesia - Bahrain bisa lebih ditingkatkan lagi. Karena itu perlu dibuka kerja sama penerbangan udara yang bisa memudahkan konektivitas kedua warga negara dalam membangun interaksi.

“Mr. Abdulhalim menyampaikan keinginannya agar maskapai mereka, Bahrain Air, bisa landing di Jakarta. Beliau juga berjanji akan membantu jika Garuda Indonesia ingin *landing* di Bahrain. Kerja sama penerbangan udara ini sangat bagus. Selain bisa meningkatkan kunjungan wisatawan kedua negara, juga bisa meningkatkan interaksi kedua warga negara,” pungkas Bamsuet.

Menyambut ajakan Bamsuet, Wakil Ketua Parlemen Bahrain Mr. Abdulhalim Abdulla Ahmed Murad menerangkan bahwa Indonesia selalu mendapatkan tempat spesial di hati masyarakat Bahrain. Menurut beliau, Bahrain selalu membuka diri terhadap berbagai kerja sama yang ditawarkan oleh Indonesia.

“Kami membuka diri untuk membangun kerja sama eksplorasi ladang minyak di Bahrain serta mengundang para insinyur Indonesia untuk berkarir di Bahrain. Selain itu, ada potensi perdagangan lainnya yang tak kalah penting. Sebagai negara yang juga memproduksi arang misalnya, Indonesia bisa memasok arang ke Bahrain. Kebutuhan arang di Bahrain sangat tinggi setiap bulannya,” ujar Mr. Abdulhalim.■

ann/sf



DPR Harapkan Pengembangan Panas Bumi Gunung Ungaran Berjalan Lancar

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto berharap pengembangan geothermal di Jawa Tengah, khususnya wilayah kerja panas bumi (WKP) Gunung Ungaran dapat berjalan dengan baik. Mengingat, Gunung Ungaran menyimpan potensi energi terbarukan sebesar 55 Mw.

Demikian mengemuka dalam Rapat Koordinasi Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang dengan Direktorat Jenderal Panas Bumi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, PT PLN Persero serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Senayan, Jakarta, Kamis (13/07).

“Geothermal ini adalah energi yang menjanjikan karena terus terbarukan dan ini akan memberikan kefaedahan bagi kemandirian bangsa. Secara keseluruhan, kami berharap pengembangan Panas Bumi di Jawa Tengah dapat berjalan lancar,” ungkap Agus.

Diketahui, saat ini telah ada 5 wilayah WKP di Jawa Tengah yaitu WKP Gunung

Ungaran, Batu Raden, Candi Umbul Telemoyo, Guci dan Dataran Tinggi Dieng dimana hanya WKP Dieng saja yang telah beroperasi. Selain itu, masih terdapat 6 wilayah potensi yang dapat dikembangkan dimana salah satunya adalah potensi panas bumi Klepu.

Agus mengatakan, banyak WKP yang sudah diserahkan namun belum beroperasi, seperti WKP Gunung Ungaran yang sempat terhenti karena one prestasi pemegang tender.

Dalam rapat tersebut, politisi F-Demokrat ini juga menanyakan rencana strategis yang akan dilakukan PLN sebagai pihak yang ditugaskan untuk melakukan eksplorasi WKP Gunung Ungaran. Ia

berharap WKP yang sudah diserahkan dapat segera dilaksanakan.

“Karena banyak pengusaha hanya memanfaatkan penunjukkan proyek tetapi tidak dikerjakan sendiri, dan akhirnya one prestasi dan terbengkalai. Sehingga saya mewanti-wanti PT PLN tidak boleh ada kerjasama seperti ini. Harus ada kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga, dimana mereka juga melakukan sesuatu. Pengalaman yang lalu kita jadi mundur dalam energi,” paparnya.

Untuk itu, ia berharap dengan penugasan ini dapat mempercepat pengembangan di WK tersebut. Sisi lain, dapat terjalin sinergi antara pemerintah, BUMN, dan Universitas dalam pengembangan panas Bumi di Jateng, Sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar.

Sementara itu, Djoko R. Abumanan selaku Direktur Regional Bisnis PLN Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara mengatakan saat ini PLN sedang dalam tahap identifikasi mitra mana saja yang akan digandeng untuk melakukan eksplorasi.

“Mitra belum ditentukan, sekarang ini tahap identifikasi, sudah disampaikan bahwa di tahun 2025 Gunung Ungaran sudah berproduksi dan menghasilkan listrik sebesar 25 Mw secepatnya bisa terlaksana,” imbuhnya. ■ [ann,mp](#)



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto Rapat Koordinasi dengan Dirjen Panas Bumi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, PT PLN Persero serta Kementerian ESDM.

Foto: Jaka7od

Fahri Hamzah Pertanyakan Data BPS Mengenai Angka Garis Kemiskinan

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku sangsi dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait rilis data angka kemiskinan di Republik Indonesia yang mencapai titik terendah sepanjang sejarah. Dalam pernyataannya, Fahri mengaku akan membuat catatan mengenai angka kemiskinan yang sebenarnya. Ia meminta agar pemerintah lebih transparan dalam menginformasikan data dan fakta kepada masyarakat.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Foto: Odjie/od

“Ada data lain yang mengatakan bahwa kedalaman kemiskinan Indonesia itu semakin tinggi. Kerawanan kemiskinan Indonesia semakin meluas. Rawan itu berarti kehidupan masyarakat terus berada di dekat garis kemiskinan. Tidak ada progres bahwa masyarakat benar-benar meninggalkan garis kemiskinan. Kemiskinan dijadikan tren harian bagi

rakyat,” ujarnya saat ditemui di Media Center DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7).

Menurut politisi dapil NTB ini, kerawanan di sekitar garis kemiskinan masyarakat belum selesai diatasi. Untuk itu ia mengaku akan mencoba mengungkap data yang dibuat oleh BPS tersebut dan mempertanyakannya kepada pemerintah.

“Saya akan ungkap data tersebut, dan membuat pemerintah akan menjawab lagi, *real* tidak perubahan ini? Sebab dari tren yang saya baca, seluruh data kemiskinan menunjukkan kita makin miskin. Buruh semakin miskin, dan yang paling besar menyumbangkan kemiskinan adalah para pekerja tani,” tegas alumni Universitas Indonesia ini.

■ eps/sf

Sinergitas Kemensos dan Perguruan Tinggi Membangun DSM Perlu Diperluas

KERJA SAMA antar Kementerian/Lembaga, khususnya Kementerian Sosial dengan perguruan tinggi dalam menjalankan program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) guna mengatasi kemiskinan perlu terus diperluas.



Foto: Riar/od

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily bersama Mensos Idrus Marham

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR menghadiri Wisuda Desa Sejahtera Mandiri (SDM) binaan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) di Ciburial, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/7).

Ace menilai, kerja sama antara Kemensos dengan STKS dalam pengembangan DSM merupakan langkah strategis guna mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Bandung dan Bandung Barat.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, pihaknya mengapresiasi tinggi atas kerja keras STKS bersama pemerintah termasuk masyarakat yang telah berhasil mengembangkan 8 Desa di Bandung

Legislator Ungkap Permasalahan Teknis Akses Internet BAKTI

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyampaikan bahwa program akses internet yang dikerjakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) merupakan program yang baik. Namun masih ada beberapa masalah teknis di lapangan yang harus diselesaikan secepatnya.



Foto: Ojijie/od

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta.

Politisi PKS ini melihat adanya beberapa temuan seperti peralatan yang sudah mulai rusak yang membuat komunikasi di beberapa daerah menjadi kembali terhambat. Selain itu juga ada perbedaan pengalokasian anggaran dari yang dilaporkan kepada DPR RI dengan yang ada di lapangan.

“Jika melihat anggaran yang disampaikan ke kami itu besar sekali. Sangat besar. Namun ketika sudah di lapangan mengapa jadi kecil sekali.

Bayangkan di Jawa Tengah di satu titik yang harus dibayarkan sebulan hanya sekitar Rp800 ribu hingga Rp1,2 juta. Artinya sebenarnya kan kecil sekali dana yang dialokasikan itu. Sementara anggaran yang dilaporkan ke kita ini besar sekali,” imbuhnya di dalam rapat dengar pendapat dengan Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Dirut BAKTI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, (16/7).

Sukamta mencontohkan bahwa betapa pentingnya akses internet

dan Bandung Barat menjadi DSM.

“Hal ini dapat mensinergikan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan di desa, mewujudkan terjadinya sinergitas antara pemangku kebijakan bidang kemensos dan bidang lainnya di desa, serta terbangunnya solusi yang komprehensif model percepatan mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia berharap langkah baik ini bisa direspon serius oleh perguruan tinggi melalui fungsi Tridarma. Pasalnya, kegiatan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat tersebut bisa membantu pemerintah, khususnya Kemensos untuk melakukan kajian awal, pemetaan sosial dan analisa potensi desa.

“Ini tentu menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk percepatan kegiatan

pembentukan Desa Sejahtera Mandiri ini mulai dari tahap perintisan, penguatan, pengembangan serta kemandirian desa,” tuturnya.

Politisi dapil Banten itu mengatakan kegiatan kerja sama antar pemerintah dengan perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi instrumen dalam menggerakkan partisipasi aktif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi produktivitas desa.

Adapun kunjungan ini diikuti oleh sejumlah Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya diantaranya, Adi Putra Darmawan Tahir (F-PG), I Gusti Agung Putri Astrid (F-PDI Perjuangan), Anda (F-Gerindra), Siti Mufatahah (F-Demokrat), Bambang Budi Susanto (F-PAN), Surahman Hidayat (F-PKS), dan Abdul Halim (F-PPP). ■ rnm/sf

bagi masyarakat. Salah satunya untuk menunjang kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Menurutnya akan sangat mudah apabila masyarakat dibina dan disosialisasikan dengan cara online, sehingga kegiatan UKM ini dapat mengangkat kehidupan masyarakat. Namun hambatan yang terjadi adalah di banyak daerah juga masih belum tersentuh internet.

“Ada terobosan yang sebenarnya sangat mudah yang bisa dilakukan yaitu dengan cara kursus online. Ini nilai dari proyek tersebut. Namun benar adanya bahwa di desa-desa belum dapat akses internet, hanya di kota saja. Kita punya program BAKTI, triliunan anggarannya, yang diberikan akses itu hanya titik, bukan lines atau area coverage-nya. Sehingga sorry to say, itu bagus programnya tetapi manfaatnya minimal,” tegasnya.

Politisi dapil Yogyakarta ini sangat berharap bahwa BAKTI dan Kominfo untuk serius dalam melaksanakan programnya, karena dengan adanya program ini ke depan negara akan bisa menghemat anggaran. Karena sosialisasi, edukasi, dan promosi jadi bisa dilakukan dengan mudah apabila proyek ini berjalan dengan lancar.

■ eps/sf

Hal ini dapat mensinergikan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan di desa, mewujudkan terjadinya sinergitas antara pemangku kebijakan bidang kemensos dan bidang lainnya di desa, serta terbangunnya solusi yang komprehensif model percepatan mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri

DPR dan Pemerintah Sepakat Bentuk Badan Karantina

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menjelaskan bahwa DPR RI dan pemerintah sepakat membentuk sebuah badan karantina, yang secara detail akan diatur dalam peraturan pemerintah. Rencananya, badan karantina ini akan berada langsung di bawah Presiden.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan.

rakyat, termasuk para petani. Sehingga bisa menjaga produk dalam negeri

“Kami bersyukur, setelah melewati beberapa masa sidang dan selalu menemukan *deadlock*, namun hari ini seluruh fraksi yang ada di Komisi IV DPR RI dan pemerintah sepakat membutuhkan sebuah badan karantina. Badan ini secara detail akan diatur lewat peraturan pemerintah,” ujar Daniel usai menggelar Rapat Panja RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (18/7).

Politisi dari Fraksi PKB ini memaparkan bahwa semangat DPR RI terhadap badan ini, agar menjadi kuat, *full power* dan bisa menjaga kedaulatan negara dan kepentingan rakyat di bidang karantina. Termasuk menjaga produk-produk lokal dalam negeri dari serangan perdagangan bebas dan persaingan global.

“Kami berharap badan yang berada langsung di bawah Presiden ini kelak akan *full power*, dan kuat dalam menjaga kedaulatan negara dan kepentingan

RUU SDA Perkuat Kewenangan Negara Atas Sumber Daya Air

DPR RI bersama pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air sebagai ganti dari UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan, nantinya RUU SDA akan memperkuat kewenangan negara atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya air.



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menyalami mitra kerja.

“Ini menjadi salah satu harapan masyarakat yang berkaitan dengan substansi RUU SDA. Bagaimana pemenuhan hak masyarakat atas air,” ungkap Fary usai penandatanganan mekanisme dan jadwal pembahasan RUU tentang SDA dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7).

Fary menambahkan, berkaca dari UU SDA yang sebelumnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi, RUU inisiatif DPR ini akan memberikan jaminan hak rakyat atas air, tidak hanya berdasarkan kualitas tetapi juga kuantitas. Karenanya, pengelolaan atau pengusahaan sumber daya air akan mengutamakan BUMN atau BUMD.

“Filosofinya, pemenuhan itu untuk kepentingan rakyat dan kita akan

dari serangan perdagangan bebas, dan persaingan global,” paparnya.

Terkait kekhawatiran pemerintah, terutama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan terjadinya pembengkakan biaya untuk menggaji pegawai dan karyawan badan tersebut terbantahkan. Pasalnya menurut Daniel, pegawai dan pejabat dalam badan karantina tersebut nantinya berasal dari kementerian-kementerian yang sudah ada, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pertanian.

“MenPAN-RB pun tidak lagi khawatir memikirkan gaji, biaya dan struktur badan nanti. Semuanya sudah ada dari beberapa kementerian saat ini. Dengan kata lain, badan ini nantinya berasal dari gabungan dari kementerian terkait. Dan itu semua sudah ada, lengkap di seluruh Indonesia,” pungkas Daniel yang juga merangkap sebagai Ketua Panja RUU Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan itu.

■ ayu/sf

berikan kesempatan kepada BUMN atau BUMD. Apabila kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, baru kita akan berikan kesempatan kepada swasta,” papar politisi F-Gerindra ini.

Hal senada disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, beberapa poin penting dalam RUU yang perlu dibahas seksama, diantaranya penguasaan air oleh negara dan pengaturan mengenai kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak rakyat atas air, agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat.

“Penguasaan sumber daya air harus hati-hati, diatur dengan benar dan berkeadilan dan memenuhi hak-hak rakyat. Baru jika masih ada sumbernya, swasta bisa masuk dengan syarat dan pengaturan ketat,” kata Basuki.

Ia menambahkan, selanjutnya swastanisasi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UU SDA yang baru dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). ■ ann/sf

Legislator Desak Pemerintah Atasi Kenaikan Harga Telur Ayam

Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani mendesak pemerintah untuk mencari solusi atas kenaikan harga telur ayam yang cukup tinggi, yakni sekitar Rp30-32 ribu per kilogramnya. Hal tersebut diungkapkannya sesaat sebelum Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (17/7).

“ Saya prihatin dengan tingginya harga telur ayam, padahal ini bukan hari raya atau hari istimewa lainnya. Oleh karena itu, saya meminta agar pemerintah, baik itu Menteri Perdagangan atau instansi terkait lainnya seperti Menteri Pertanian untuk segera mencari solusi agar harga telur ayam bisa stabil,” ujar Hamdhani.

Dilanjutkannya, untuk langkah pertama

Hamdhani meminta kementerian terkait untuk turun langsung ke pasar-pasar untuk melihat langsung harga telur ayam di pasaran, termasuk juga ketersediaan atau pasokan telur ayam. Jangan sampai terjadi permainan, seperti penimbunan telur ayam.

“Selain itu, pemerintah juga bisa memaksimalkan para peternak dalam beternak unggas. Diantaranya dengan memberikan bantuan bibit unggas unggul plus pakan ternak,” papar politisi dari Fraksi Partai Nasdem itu.

Terkait dugaan adanya pakan ternak impor yang harganya melambung, sementara pakan ternak lokal sangat minim pasokannya, Hamdhani menilai hal tersebut masih harus diteliti lebih jauh. Meski demikian, untuk saat ini menurut Hamdhani hal yang utama adalah segera mencari solusi atas kenaikan harga telur ayam, bukan sekedar mencari penyebabnya.

Sementara itu dikutip dari beberapa media, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, I Ketut Diarmita baru-baru ini mengatakan bahwa kenaikan harga telur ayam yang cukup signifikan itu akibat terjadi lonjakan kebutuhan telur ayam nasional.

Diantaranya karena adanya program Kementerian Sosial tentang Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) dalam bentuk satu kilogram (kg) telur ayam per keluarga miskin. Dalam waktu yang bersamaan, Pemerintah DKI Jakarta juga memberikan bantuan berupa telur ayam bagi warga DKI dengan menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Pemda DKI menandatangani kerjasama dengan Pemda Blitar untuk memasok telur ayam ke DKI Jakarta. ■ ayu/sf



Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani.

Foto: GeraiD/oc



Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto meninjau Stadion Patriot Candrabagha, Bekasi.

Momentum Asian Games, Pemerintah dan Masyarakat Diminta Manfaatkan Potensi Ekonomi

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto meminta pemerintah dan masyarakat untuk mampu memanfaatkan potensi ekonomi saat penyelenggaraan Asian Games 2018 pada Agustus mendatang. Karena itu, semua pihak diminta mampu mempersiapkan dengan baik dan memanfaatkan peluang industri kreatif, selain juga dari aspek penyelenggaraan yang menurutnya sudah cukup baik.

“ Saya bangga dengan persiapan yang relatif singkat, namun kita bisa menyelesaikan persiapan dalam menghadapi Asian Games. Tapi ya tetap persiapan secara teknis harus diperhatikan,” ujar Djoko saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI meninjau Stadion Patriot Candrabagha, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (12/7).

Politisi Partai Demokrat ini

menegaskan penyelenggaraan Asian Games harus mampu mencapai empat sukses yakni sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi dan sukses meningkatkan ekonomi kreatif. Untuk mencapai semuanya maka harus dipersiapkan dengan baik.

Khusus untuk potensi ekonomi, Djoko menjelaskan industri ekonomi kreatif harus mampu tampil guna memanfaatkan

peluang ekonomi ini. Mengingat Asian Games ini akan menghasilkan target devisa sebesar 170 juta dolar AS atau sekitar Rp3,6 triliun. “Ini satu kesempatan yang besar dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional,” tegas Djoko.

Dirinya pun berharap penyelenggaraan Asian Games dapat terlaksana dengan baik tanpa hambatan. Namun, Djoko mengingatkan kepada INASGOC, selaku



Foto: Hendra/oc

panitia penyelenggara Asian Games mampu mempersiapkan promosi dengan jumlah besar. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan Asian Games ini.

“Perlu diperhatikan tentang promosi. Kita belum lihat apa saja yang dilakukan di sini. Jadi masyarakat belum terinformasikan dan ini belum tersosialisasikan dengan baik. Kita akan minta INASGOC pada tanggal 25 Juli mendatang untuk kepastian keluarnya daftar acara. Sehingga memudahkan masyarakat untuk tahu,” tegas Djoko.

Namun demikian, Djoko menuturkan persiapan Asian Games sejauh ini cukup baik. Terhadap segala kekurangan yang ada, pihaknya meminta untuk dapat diselesaikan secepatnya. Termasuk juga soal keamanan dan arus lalu lintas jalan sepanjang berlangsungnya Asian Games.

■ hs/sf



Foto: Husen/od

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa.

Sistem Keamanan Asian Games Palembang Sangat Baik

Sistem keamanan jelang Asian Games 2018 di Palembang, Sumatera Selatan sangat baik. Berbagai ancaman keamanan dan teror sudah diantisipasi dengan sigap. Bahkan, terduga teroris pun sudah diamankan Polda Sumsel, termasuk membersihkan kejahatan jalanan.

Demikian terungkap saat Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI menggelar pertemuan dengan Kapolda Sumsel Zulkarnain, Kajati Sumsel Ali Mukartono, dan Kakanwil Kemenkumham Sumsel Sudirman Nury di Palembang, Kamis (12/7).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat memimpin pertemuan mengatakan, Komisi III sangat berkepentingan mendengar langsung kesiapan Asian Games dengan para mitra kerjanya, karena ini menyangkut kehormatan bangsa Indonesia sebagai tuan rumah.

“Tamu peserta harus merasa nyaman di Indonesia. Pelayanan dari sejak kedatangan hingga hotel harus juga baik,” kata Desmond.

Sementara itu, Kapolda Sumsel Zulkarnain mengungkapkan, Polda Sumsel sendiri punya program ‘Cipta Kondisi’ untuk membersihkan kejahatan jalanan (street crime) jelang dan selama Asian Games. “Kejahatan jalanan saya sikat betul,” ucap Zulkarnain.

Dijelaskan Zulkarnain, ada 20 cabang olahraga yang dipertandingkan di Palembang, seperti diantaranya voli pantai, sepak bola wanita, sepak takraw, dan panjat tebing. Peserta dari 40 negara dipastikan akan datang ke Palembang.

Bahkan, delegasi China akan datang pada akhir Juli ini dan sebagian negara lainnya pada awal Agustus. Untuk mendukung sistem keamanan, Polda Sumsel sudah memasang beberap CCTV di semua venue, jalan raya, dan bandara. ■ mh/sf

Komisi X Dukung Kesuksesan Asian Games di Palembang

Komisi X DPR RI meninjau persiapan Kota Palembang, Sumatera Selatan sebagai salah satu tuan rumah Asian Games XVIII tahun 2018. Kunjungan Kerja ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi secara langsung persiapan Sumatera Selatan untuk mensukseskan pekan olahraga internasional ini.

Tim Kunker Komisi X DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meninjau langsung mulai dari kesiapan stasiun LRT yang menghubungkan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II sampai dengan kompleks Gelora Jakabaring. Komisi X DPR RI juga melihat dan mengevaluasi persiapan kompleks Gelora Jakabaring Palembang dan Wisma Atlet.

Setelah meninjau beberapa tempat dan berdialog dengan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Sutan

mengapresiasi Gubernur Sumsel. Pasalnya, dengan keterbatasan waktu persiapan yang hanya satu tahun tapi hasilnya sudah cukup maksimal. Dengan kewenangan dan fungsi yang dimiliki Komisi X DPR RI pun memberikan dukungan yang maksimal agar kesuksesan Asian Games di Palembang bisa tercapai.

“Saya yakin Insya Allah pada waktunya bisa 100 persen dimanfaatkan dengan baik. Sumatera Selatan tentu berbangga punya gubernur yang visioner seperti Pak Alex Noerdin,” papar Sutan di Palembang, Sumsel, Jumat (12/7).

Komisi X DPR RI mengharapkan dalam perhelatan Asian Games 2018 ini dapat mewujudkan sukses penyelenggaraan dengan kesiapan infrastruktur, mulai dari seluruh fasilitas olahraga dan sarana pendukung lainnya, seperti transportasi jalanan, jembatan, LRT dan lain sebagainya.

Tak hanya itu, dalam kesempatan ini Komisi X DPR RI juga memastikan bahwa dalam pelaksanaan Asian Games ini dapat terselenggara secara sukses administrasi, berupa koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, KOI dan INASGOC.

Selain itu yang tak luput dari perhatian Komisi X DPR RI adalah kesuksesan pemberdayaan ekonomi saat Asian Games 2018, yakni dengan tercapainya target kunjungan wisatawan baik asing atau mancanegara.

Komisi X DPR RI juga meminta kepada Pemda Sumsel agar meningkatkan dukungan masyarakat pelaku usaha, dalam memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan AG 2018 ini. ■ eko/sf



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra tinjau kompleks Gelora Jakabaring Palembang.

Komisi X Desak Akses Jalan Menuju Arena Pentathlon Tigaraksa Segera Diselesaikan

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai akses jalan dari pintu tol ke lokasi venue di Tigaraksa Tangerang yang akan dipakai pertandingan Modern Pentathlon masih memprihatinkan. “Kita rombongan Komisi X saja masuk susah. Karena itu minta Inasgoc segera berkoordinasi dengan Kemenpora untuk minta Kemen PUPR dan Kemendagri membantu menyelesaikan jalan sekitar 1 km,” ujarnya di sela-sela kunjungan, di Desa Tapos, Tigaraksa, Tangerang, Banten, Kamis (12/7).

Menurut Pimpinan Komisi dari F-PKS ini, mengingat waktu yang kian dekat dengan pembukaan Asian Games tanggal 18 Agustus, maka akses jalan tersebut harus segera diselesaikan. Dalam dialog dengan Pj.Bupati Tangerang dijelaskan bahwa penugasan kepada Pemkab Tangerang untuk menyiapkan arena Modern Pentathlon baru disampaikan pada Maret sehingga tidak bisa mengalokasikan di APBD.

Namun bersyukur masalah ini dapat diatasi dengan bantuan CSR Bank BJB lebih dari Rp 2 miliar. “Ini sebuah terobosan dan gerak cepat dari pemerintah yang patut diapresiasi,” jelasnya.

Meski demikian, harus ada kejelasan baik Inasgoc maupun Kemenpora untuk melaksanakan Asean Games ada empat misi yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, administrasi dan sukses ekonomi. Kalau ini akan dilaksanakan betul maka Pemda dipersilahkan untuk menghadirkan karya-karya masyarakat baik *handycraft* maupun produk rumah tangga lainnya untuk dipamerkan dan dijual. “Bekerja sama dengan pengusaha dan pengrajin mereka sudah siap,” katanya.

Termasuk kehadiran penonton, kata legislator Dapil Jateng ini, perlu peran Pemda untuk memobilisasi masyarakat sekitar ke venue tersebut, sebab



Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dipimpin Abdul Fikri Faqih

Foto: Nadya/od

lokasinya jauh. Modern Pentathlon berada di lokasi SMA Adria Pratama Mulya Boarding School Tiga Raksa akan mempertandingkan lima cabang olah raga yaitu anggar, renang 200 meter, berkuda, lari 3.200 meter dan tembak laser.

Yang juga patut dihargai upaya Bupati untuk menyemarakkan Pesta Olah Raga Asia ini memberi tugas kepada para Camat untuk menghadirkan masyarakat bahkan membantu tiketnya. “Agar pesta olah raga ini lebih semarak tiket untuk menyaksikan cabang olah raga ini perlu digratiskan. Apalagi pertandingan ini hanya berlangsung dua hari tanggal 31 Agustus dan 1 September dan cabang olah raga ini belum begitu menarik masyarakat,” jelasnya.

Dari masukan-masukan yang diterima, lanjut Fikri, Komisi X akan membahas lagi dengan Kemenpora dan Inasgoc guna penyelesaian hambatan ini. Sebagaimana dijanjikan, akses jalan ini akan selesai dua pekan lagi atau akhir Juli dan Komisi X akan datang kembali dengan harapan semua venue dan infrastruktur siap menyambut duta olah raga dari 9 negara cabang Pentathlon.

Kunjungan kerja ini juga diikuti sejumlah Anggota Komisi X DPR RI, diantaranya Wiryanti Sukamdhani (F-PDI Perjuangan), Suryo Alam, Mujib Rohmat dan Bambang Sutrisno dari F-PG, Amran (F-PAN), Mustafa Kamal (F-PPKS), Anwar Idris (F-PPP) dan Yayuk Rahayuningsih (F-Nasdem). ■ mp/sf

Pemerintah Belum Kreatif Cari Sumber Pendapatan

Pemerintah dinilai belum melakukan langkah kreatif untuk mencari sumber-sumber pendapatan untuk APBN. Selama ini, sumber pendapatan pemerintah masih bertumpu pada pajak serta bea dan cukai. Sementara bila pembiayaan mengalami defisit, pemerintah selalu menutupnya dengan utang.



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.

Foto: Gerald/oc

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menegaskan hal itu sebelum mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7). Itulah salah satu argumen mengapa fraksinya menolak laporan pemerintah dalam RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2017.

“Sampai hari ini belum ada langkah kreatif. Karena dari sumber pendapatan yang kita lihat di APBN, sumbernya dari pajak dan kedua dari bea cukai. Kalau pembiayaan defisit, jalan satu-satunya adalah berutang. Utang bukan hal yang tabu. Silakan saja sepanjang dimanfaatkan untuk hal-hal bermanfaat seperti proyek-proyek yang bisa menghasilkan dan membiayai utang itu sendiri,” papar

Anggota F-Gerindra DPR ini.

Selama ini Heri melihat, belum kreatifnya pemerintah mencari sumber pendapatan, menimbulkan adagium ‘gali lubang tutup lubang’ dalam mencari sumber pendapatan, sekaligus menutupnya dengan utang. Pendapatan APBN diperoleh dari berutang. Sementara utang ada yang jatuh tempo jangka pendek dan jangka panjang. Utang yang jangka pendek jumlahnya Rp340 triliun akan dibiayai APBN. “Di sinilah gali lubang tutup lubang itu,” imbuh Heri.

Pada bagian lain, ia memaparkan argumen penolakan laporan pertanggungjawaban pemerintah atas APBN 2017. Menurutnya, pemerintah sudah memutuskan angka pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Faktanya,

pertumbuhan ekonomi maksimal hanya tumbuh 5 persen. Terakhir pada 2017 tumbuh 5,07 persen saja. Tentu saja ini tak sesuai dengan UU APBN 2017 yang disepakati pemerintah dan DPR.

“Padahal pemerintah sudah kita berikan ruang gerak yang lebih besar antara lain belanja sampai Rp2.130 triliun. Tetapi nyatanya, belanja ini ditutup dari pendapatan pajak. *Tax ratio* tiap tahun kian turun. Bahkan pada 2017 *tax ratio* kita di angka 9,9 persen. Dengan fakta ini, dalam amanat UU APBN yang disusun untuk mensejahterakan masyarakat, ternyata beberapa keseimbangan primer kita negatif,” jelasnya lebih lanjut. ■ mh/sf

Komisi VIII Dorong Koordinasi BPBD dan Badan Geologi Yogyakarta

Letusan Gunung Merapi di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta akhir-akhir ini menjadi sorotan penting untuk Komisi VIII DPR RI. Sebab beberapa bulan terakhir ini Gunung Merapi sudah berkali-kali mengeluarkan letusan.

Anggota Komisi VIII DPR RI Asli Chaidir mendorong perlunya koordinasi yang baik antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Geologi Yogyakarta, agar dapat dapat memberikan arahan kepada warga sekitar pegunungan supaya meminimalisir korban jiwa

“Antara BPBD dengan Badan Geologi harus ada komunikasi dan kerja sama yang baik. Hal ini dilakukan agar nantinya Badan Geologi bisa memberikan informasi

cepat tentang status Gunung Merapi tersebut, supaya ada pergerakan yang cepat dari BPBD,” pinta Chaidir saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI terkait Evaluasi Penanganan Bencana Erupsi Gunung Merapi ke DI Yogyakarta, Rabu (11/7).

Selain didukung oleh alat-alat canggih yang sesuai standar untuk mendeteksi kegiatan gunung merapi, Komisi VIII DPR RI juga mengapresiasi para relawan yang telah banyak membantu BPBD untuk membantu mengevakuasi korban pada saat terjadi erupsi.

“Kita juga sudah mendengar

penjelasan dari BPBD, bahwa sukarelawan telah terpanggil hatinya untuk membantu dan mereka bekerja cukup baik, semua itu dikerjakan karena panggilan hati dan keikhlasan mereka,” apresiasi politisi PAN itu.

Mewakili Komisi VIII DPR RI, pihaknya sangat senang mendengarkan laporan mengenai penanganan letusan Gunung Merapi dari BPBD Yogyakarta. “Laporannya cukup baik dan menggairahkan.

Mereka bekerja dengan semangat. Kita berterima kasih, mudah-mudahan dapat memberikan dampak baik untuk masyarakat Gunung Merapi,” imbuhnya.

Dalam kunjungan kerja kali ini, hadir pula sejumlah Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, diantaranya seperti Supriyanto, Syofwatillah Mohzaib, An'im Mahrus, Nurul Khotimah, Achmad Fauzan dan Titik Prasetyowati. ■ jay/sf

APBN 2018 Tidak Berubah, Sektor Migas Stagnan

Anggota Komisi VII DPR RI Rofi' Munawar menilai rencana pemerintah yang tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2018 akan menyebabkan sektor migas stagnan. Terlebih sejumlah perhitungan di sektor migas tidak lagi sesuai dengan asumsi awal dan mengalami banyak perubahan.

“Jika APBN 2018 diputuskan tetap konservatif dan tidak berubah, khawatir akan semakin membebani sektor migas secara nasional. Padahal Indonesia Crude Price (ICP) sudah diangka 70-75 USD/per barel dan nilai tukar rupiah saat ini bergerak diangka Rp 14.000, sangat jauh dari asumsi awal,” disampaikan oleh Rofi' Munawar dalam rilis yang dikirim kepada media pada hari Rabu, (11/7).

Legislator asal Fraksi PKS itu menambahkan, saat ini capaian APBN 2018 jika dicermati beberapa asumsi disektor migas tidak sesuai dengan realisasi yang terjadi, khususnya pada kuartal I 2018. Meski asumsi makro



Anggota Komisi VII DPR RI Rofi' Munawar.

Foto: Odljer/od

kini meleset, seperti Harga Batubara Acuan (HBA) pada Juli 2018 mencapai USD104,65 per ton dan harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) periode Juni 2018 mencapai USD 70, 36 per barel, padahal rata-rata harga minyak dahulu diasumsikan pada angka USD 48 per barel.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus terdepresiasi menembus level Rp14.000 per USD, padahal saat itu nilai tukar rupiah dipatok di angka Rp 13.400 per USD. Selain itu, asumsi lifting minyak 800.000 bph, realisasinya hanya 750.300 bph. Terakhir, asumsi lifting gas 1,200 juta barel setara minyak, realisasinya 1,1559 juta barel setara minyak.

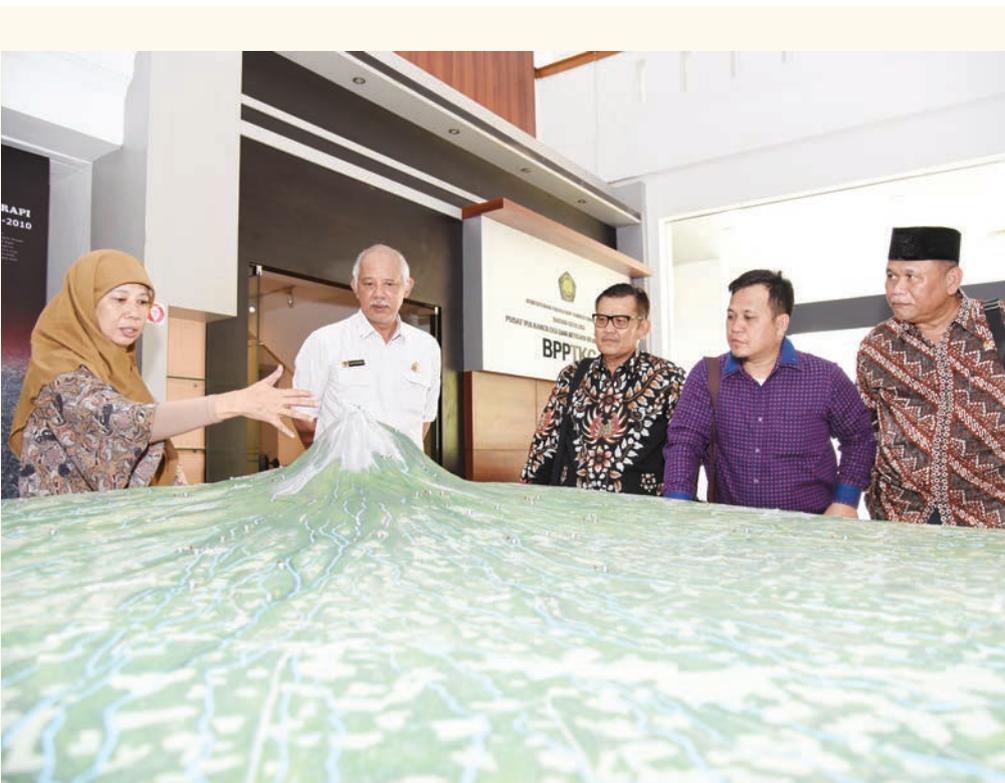
“Pemerintah tidak bisa hanya mengambil sebuah kebijakan dalam perspektif makro semata, padahal secara mikro memiliki masalah dan berpotensi terjadi pembebanan. Akibat kebijakan ini sektor migas dipastikan akan mendapatkan dampak yang besar dan berpotensi stagnan,” tegasnya.

Rofi' juga melihat situasi ini akan semakin memberatkan bagi PT. Pertamina dan PT. PLN, karena secara khusus kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah akan menyebabkan keuangan perusahaan tersebut menjadi berat. Selain itu juga selama ini dua BUMN pelat merah itu mendapatkan tugas PSO dalam bentuk pendistribusian BBM penugasan dan subsidi listrik. Rofi melihat, besaran anggaran subsidi listrik diprediksi bakal melebihi yang sudah ditetapkan APBN.

“Harga minyak mentah di pasar internasional terus meningkat. Memang secara selintas APBN 2018 bakal diuntungkan oleh kenaikan harga minyak, karena subsidi BBM sudah diminimalkan. Namun, PT Pertamina saat ini terus menanggung dampak negatif kenaikan harga minyak, padahal tren kenaikan harga minyak diperkirakan masih berlanjut pada tahun ini,” ulasnya.

Sebagaimana diberitakan, Pemerintah memutuskan tidak akan melakukan perubahan pada APBN 2018. Pemerintah menilai postur APBN 2018 dinilai cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara maupun jumlah belanja negara. Sementara defisit lebih kecil dari yang direncanakan dari semula 2,19 persen menjadi 2,12 persen.

■ es/si



Anggota Komisi VIII DPR RI Asli Chaidir.

Foto: jayadi/od

RS Stella Maris Makassar Layak Dijadikan Rujukan Jamkestama

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau Rumah Sakit (RS) Stella Maris, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/7), guna melihat pelayanan Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama), khususnya untuk kesehatan Anggota DPR RI dan keluarganya. Dari hasil tinjauan, RS Stella Maris dinilai layak dijadikan rujukan Jamkestama.

Wakil Ketua BURT DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Novita Wijayanti menuturkan Anggota DPR RI yang memiliki aktifitas yang tinggi dan sering melakukan kunjungan kerja keluar kota dan sering berpindah tempat rentan terkena sakit dan dan terkadang tidak membawa kartu asuransi kesehatan dari Jasindo.

“Dari penjelasan Dirut RS Stella Maris, kami sangat mengapresiasi fasilitas rumah sakit ini, dari peralatan hingga dokter spesialis sangat lengkap dan saya

harap untuk manajemen rumah sakit tidak langsung menolak atau mempersulit ketika ada pasien yang mendaftar, namun lupa membawa kartu asuransi,” tutur Politisi Gerindra tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua BURT Nurhayati Manoarfa terhadap fasilitas RS Stella Maris Makassar yang lengkap, sehingga bisa dijadikan rujukan bagi peserta Jamkestama.

“Sebagai rumah sakit tipe B, saya melihat RS Stella Maris sudah lengkap dari dokter spesialis dan sub spesialis.

Ruangannya juga baik dan bersih, sehingga RS ini bisa direkomendasikan untuk dijadikan rujukan bagi peserta Jamkestama,” tutur politisi PPP itu.

Menanggapi hal tersebut Direktur RS Stella Maris Makassar Thomas Soharto menyambut baik atas kunjungan Anggota BURT DPR RI dan memastikan seluruh pelayanan rumah sakit dapat berjalan dengan lancar.

Terkait kartu Jamkestama yang tertinggal saat berobat, Thomas menjamin bahwa RS Stella Maris dapat menerimanya. “Kami mengutamakan pelayanan, terpenting pasien tertangani dengan baik, mengenai kartu asuransi yang tertinggal itu bisa diurus setelah pasien tertangani dan zaman sekarang sudah serba *online*, pasien yang datang tinggal menyebutkan identitas dan asuransinya saja,” tutur Thomas. ■ rh/sf



Ketua Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI Novita Wijayanti.



Foto: Odjier/od

Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso.

Kartu Peserta Jamkestama Perlu Ditingkatkan Fungsinya

Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso menginginkan adanya peningkatan fungsi kartu peserta Jamkestama, sehingga memungkinkan ada chip yang berisi riwayat penyakit (rekam medis) si pasien pemegang kartu.

“Sehingga ketika pasien datang dalam kondisi tidak sadarkan diri tanpa didampingi keluarganya dokter bisa cepat melakukan tindakan diagnosa dibantu oleh data riwayat penyakit (rekam medis) yang ada dalam chip kartu milik peserta Jamkestama tersebut,” ujar Agung usai meninjau fasilitas kesehatan di Siloam Hospitals Manado dalam rangka Kunspek BURT DPR RI, Kamis (12/7).

Politisi Partai Demokrat ini menekankan perlunya peningkatan layanan kartu peserta yang memiliki data rekam medis akan sangat membantu pihak rumah sakit yang saat menerima pasien sama sekali tidak mengetahui riwayat pasien.

“Yang kedua, pemegang kartu Jamkestama harus diberikan berbagai fasilitas kemudahan, jangan lagi kita nanti

masih disuruh mengisi formulir, mau pulang juga masih dihambat karena proses konfirmasi yang memerlukan waktu cukup lama. Kalau kita sudah ditanggung oleh Jasindo melalui program Jamkestama maka urusan birokrasi menjadi tanggung jawab Jasindo untuk menyelesaikan dengan pihak rumah sakit, jangan lagi mempersulit peserta,” ungkap Agung Budi Santoso.

Politisi kelahiran Pekalongan ini menghimbau Rumah Sakit tidak memperlama proses birokrasi, karena data base peserta Jamkestama terdiri dari suami-istri beserta 3 orang anak semua sudah dishare ke seluruh rumah sakit provider yang bekerja sama dengan Jasindo. Mengenai hal-hal yang dicover dan tidak dicover itu menjadi kesepakatan bersama antara pihak Jasindo dan Rumah Sakit, apapun obat yg diresepkan oleh dokter seharusnya langsung dicover agar tak lagi memperlambat layanan pasien.

“Jika ada jeda waktu antara kedatangan pihak keluarga pasien dengan jam besuk, maka ini perlu diberikan fasilitas ruang tunggu yang nyaman agar mereka merasa terlayani dengan baik sambil menunggu kedatangan dokter yang bertugas menangani,” imbuhnya.

Menghimbau Rumah Sakit tidak memperlama proses birokrasi, karena data base peserta Jamkestama terdiri dari suami-istri beserta 3 orang anak semua sudah dishare ke seluruh rumah sakit provider yang bekerja sama dengan Jasindo.

Legislator asal Dapil Jawa Barat I ini juga mengapresiasi pilihan Jasindo dalam mencari rumah sakit providernya yang terbaik, representatif dan memenuhi standar untuk melayani peserta Jamkestama, dalam hal ini anggota DPR dan keluarganya.

“Siloam Hospitals Manado menurut kami sudah cukup baik karena dari sisi dokter spesialisnya sudah banyak, kamar-kamar rawat juga bagus, peralatan medisnya tadi kita lihat sudah cukup lengkap dan tidak diragukan lagi,” tutup Agung. ■ oji/mp

Direksi dan Komisaris Dilarang Rangkap Jabatan

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN yang sedang dibahas saat ini, akan ditekankan tentang pasal pelarangan direksi dan komisaris BUMN yang merangkap jabatan. Menurutnya, dalam pembahasan RUU ini hampir semua fraksi sudah sepakat tentang poin pelarangan rangkap jabatan bagi direksi dan komisaris BUMN itu.

“Nanti bisa lihat di pasal 21, kemudian pasal 23, dan pasal 38. Di sana sudah jelas ada normanya, yang melarang rangkap jabatan bagi pejabat struktural maupun fungsional di kementerian, baik sebagai direksi maupun komisaris, termasuk bagi anggota partai politik. Itu limitatif kita atur,” papar Supratman di Media Center, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7).

Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘RUU BUMN, Mencegah BUMN jadi ATM jelang Pemilu 2019’. Turut hadir sebagai pembicara dalam forum yang sama Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani, Ekonom atau mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, dan Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky



Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas.

Foto: Rumi/od

Khadafi. Supratman menegaskan, lebih

lagi rangkap jabatan untuk bagi-bagi kekuasaan ke tim sukses saat pemilihan,

Peningkatan TKDD Harus Dorong Pertumbuhan Daerah

Data alokasi realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan menunjukkan bahwa ada peningkatan selama tahun 2015-2017. Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa meningkat dari Rp622 triliun, pada tahun 2015 menjadi Rp731 triliun pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 17,6 persen.



Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo.

Foto: Singgih/od

Hal ini disampaikan Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo saat memimpin Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI bertemu dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Jatim, Kamis (12/7).

“Peningkatan realisasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan asli Daerah (PAD), sehingga mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat,” ungkap Andreas.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan bahwa dibalik kondisi yang cukup baik ini terkait peningkatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa masih terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi diantaranya permasalahan terkait ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, Dana Alokasi Khusus yang meliputi penyerapan

itu tidak dibenarkan. Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan juga, tentang aturan satu kali masa jabatan yang hanya berlaku selama lima tahun.

“Bahwa rangkap jabatan struktural dan fungsional, di kementerian itu tidak boleh ada. Yang kedua jabatan rangkap hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi ke tim sukses sama sekali tidak dibenarkan. Nah, oleh karena itu, kami buat regulasi di dalam RUU yang baru, bahwa masa jabatan direksi dan komisaris itu adalah lima tahun,” jelasnya.

Supratman menambahkan, aturan tentang rangkap jabatan ini semata-mata untuk menyehatkan struktur organisasi BUMN, agar direksi dan komisaris dijabat oleh orang-orang yang betul-betul profesional di bidangnya. Sehingga, tidak ada lagi BUMN yang merugi atau bahkan bangkrut.

“Jadi kalau ada BUMN yang rugi menurut saya tidak *logic*, apa lagi yang diberi Penanaman Modal Negara (PMN), itu sama sekali tidak *logic*. Kecuali yang diberi penugasan khusus, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang memang harus dengan dana subsidi,” ungkap politisi yang juga Anggota Komisi VI DPR RI itu. ■ **eko/sf**

anggaran DAK yang belum optimal.

“Permasalahan saldo DAK yang masih mengendap dan belum optimal pemanfaatannya serta permasalahan seputar permasalahan Dana Desa harus segera dicarikan solusinya, agar alokasi penggunaan Transfer ke daerah dan Dana Desa bisa digunakan seoptimal mungkin,” jelas Andreas.

Andreas menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi terbesar dengan realisasi TKDD. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBD terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa masih tinggi, dimana Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa komposisi pendapatan daerah dalam APBD 2017 secara nasional terdiri dari PAD sebesar 24,18 persen, Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 66,11 persen dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebesar 9,71 persen.

“Secara nasional, Jawa Timur merupakan provinsi yang paling besar menerima TKDD. Namun menurut hasil audit dari BPK menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan terutama DAK yang masih mengendap dan laporan penggunaan Dana Desa yang masih terjadi masalah,” jelasnya. ■ **skr/sf**

DPR dan Pemerintah Sepakati Target Pembangunan 2019

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah sepakat atas laporan Panitia Kerja (Panja) dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Satu hal yang disepakati yakni asumsi makro dan target pembangunan pada 2019.

Diketahui, asumsi makro RAPBN 2019 yang telah disepakati ini mencakup pertumbuhan ekonomi 5,2 hingga 5,6 persen, laju inflasi 2,5 hingga 4,5 persen, nilai tukar Rp13.700 hingga 14.000 per dolar AS dan tingkat bunga SPN 3 bulan 4,6 hingga 5,2 persen.

Selain itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berkisar 60 hingga 70 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 722 hingga 805 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.210 hingga 1.300 ribu barel setara minyak per hari.

Untuk target pembangunan 2019 telah disepakati angka pengangguran 4,8 hingga 5,2 persen, angka kemiskinan 8,5 hingga 9,5 persen, indeks rasio gini 0,38 hingga 0,39 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,98. Dalam postur makro fiskal, disepakati pula kisaran defisit anggaran sebesar 1,6 hingga 1,9 persen terhadap PDB.

Ketua Banggar Azis Syamsuddin menuturkan hasil ini menjadi upaya untuk memfokuskan program prioritas

Catatan panja belanja pemerintah pusat, yakni harus ada *blueprint* alokasi gaji bagi purnawirawan dan veteran untuk peningkatan kesejahteraan. Dan pemerintah diminta juga memperhatikan anggaran untuk Basarnas dan pengalokasian dana pemilu



Ketua Banggar Azis Syamsuddin.

Foto: Jayadi/od

nasional. “Hasil panja ini tentang kebijakan umum pemerintah pusat dan difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional,” kata Azis saat Raker dengan Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/7).

Selain hal di atas, Azis mengungkap-kan Banggar DPR telah memberikan catatan kepada pemerintah terkait RAPBN 2019, diantaranya perlu adanya peninjauan pembiayaan PMN (Penyertaan Modal Negara). Kedua, pemerintah diminta meningkatkan kualitas kurikulum berdasarkan revolusi industri 4.0.

Ketiga, catatan panja belanja pemerintah pusat, yakni harus ada *blueprint* alokasi gaji bagi purnawirawan dan veteran untuk peningkatan kesejahteraan. Dan pemerintah diminta juga memperhatikan anggaran untuk Basarnas dan pengalokasian dana pemilu dari APBN. ■ **hs/sc**

Setjen dan Badan Keahlian DPR Yakin Capai Target Level Maturitas SPIP

DPR RI sebagai lembaga yang memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, bertanggungjawab untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.

Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dalam sambutannya pada acara sosialisasi *self assesment* Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2018 oleh BPKP.

“Prinsipnya

keuangan negara Rp1 pun akuntabilitasnya harus dipertanggung-jawabkan,” imbuh Indra di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/7).

Untuk itu, guna mewujudkan *good and clean governance*, Indra mengundang seluruh Pejabat Eselon I, II, III, IV, dan pegawai DPR RI untuk hadir dalam sosialisasi yang dilakukan oleh BPKP. Ia berharap kegiatan ini akan memberikan pemahaman mengenai SPIP yang nantinya akan dilakukan secara individu pada setiap unit kerja.

Indra mengatakan maturitas atau tingkat kematangan SPIP di DPR saat ini berada di level 2 atau dalam tahapan berkembang. Artinya DPR RI telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik. Kemudian pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan seluruh unit kerja organisasi dan efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Sebagai salah satu lembaga yang menjadi tolak ukur penilaian lembaga lain, Presiden Joko Widodo menargetkan DPR RI berada di level 3 pada 2019 mendatang. Untuk itu, Indra meminta komitmen para pejabat dan pegawai untuk melakukan pendokumentasian kegiatan menjadi lebih baik. Diakui Indra untuk mencapai maturitas ke level 3 bukan hal yang mudah. Namun dengan kerja sama yang baik, diyakini akan tercapai bahkan ke level 4 sekaligus.

“Walaupun sulit, kalau kita punya keinginan yang sama pasti akan tercapai. Bahkan saya sudah bicara dengan Deputy BPKP dan jajarannya, kita ingin bukan cuma level 3, bahkan sampai di level 4. Jadi ketika suatu kegiatan terdokumentasi dengan baik, *eviden*-nya baik, jadi semuanya juga baik,” yakin Indra.

Diketahui, untuk mendukung kelancaran program ini dan mewujudkan *good governance* di Indonesia, BPKP mensosialisasikan aplikasi untuk melakukan *self assesment* yang dapat diakses di <http://spip.inostra.com>.

“Kalau sebelumnya *self assesment* ini masih ada yang manual. Sekarang dengan kemudahan sistem yang ada sekarang diharapkan seluruh pejabat disemua level bisa melakukan *self assesment* berdasarkan panduan dari BPKP,” ungkap Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia BPKP Ernadhi Sudarmanto dalam sambutannya.

Ada lima kriteria penilaian untuk meningkatkan maturitas pelaporan SPIP yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. ■ *apr/sf*

Inspektur Utama (Irtama) Setjen dan BK DPR RI Setyanta Nugraha menuturkan, kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari program Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIP) Indonesia. Dimana suatu lembaga akan diaudit oleh lembaga lain berdasarkan 32 eviden yang telah ditetapkan.

“Ini merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa hasil audit itu telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Kemudian hasil kegiatan ini juga nanti akan bisa menjadi dokumen untuk memenuhi syarat kenaikan level Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),” jelas Totok, sapaan akrab Setyanta di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7).

Totok mengatakan, hasil audit nanti sangat penting sebagai salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kapabilitas APIP menjadi level III sebagaimana target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019 mendatang. APIP memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Untuk itu setiap lembaga berupaya untuk meningkatkan level APIP guna mencapai *good governance*.

“Kita dipastikan betul, bahwa hasil kerja auditor itu dinilai oleh auditor lainnya, dinilai hasilnya layak atau tidak. Itulah dokumen untuk kita bisa memenuhi kenaikan level APIP. Yang diharapkan tahun ini level kita masuk ke III, meskipun itu target RPJMN 2019 nanti,” ungkap Totok.

Dalam kesempatan ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan RI mendapat kepercayaan dari Komite Pengawas untuk melakukan *benchmarking* terhadap auditor di Ittama DPR RI. Menurut Itjen Kemendag Srie Agustina hasil dari pelaksanaan ini nantinya dapat menjadi pembelajaran



Foto: Ojijie/od

Irtama Setjen dan BK DPR RI Setyanta Nugraha *entry meeting* Bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan RI.

Ittama DPR Harapkan Hasil Telaah Mampu Tingkatkan Level APIP

Inspektorat Utama (Ittama) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan RI melakukan *entry meeting* telaah sejawat dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu hasil pengawasan intern guna mewujudkan cita-cita auditor intern untuk memberi nilai tambah bagi organisasi.

dari kedua belah pihak untuk saling melakukan perbaikan sehingga menjadi lembaga yang semakin baik.

“Kami menurunkan tim dari Kementerian Perdagangan maksudnya bukan berarti kami lebih baik, tetapi lebih kepada untuk tukar menukar pengalaman dan mendiskusikan hal yang sama, agar berikutnya pelaksanaan

audit di masing-masing lembaga bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,” tutur Srie.

Benchmarking kedua Inspektorat Jenderal ini akan dilakukan selama sepuluh hari, dimulai dari 23 Agustus–2 September 2018. Sebanyak 32 dokumen akan ditelaah diantaranya Piagam Audit beserta hasil revisi dan Revisi Piagam

Audit, struktur organisasi APIP dan struktur organisasi Setjen DPR, Kode Etik, SOP/peraturan terkait mekanisme pemantauan kode etik, dan hasil pemantauan kode etik, serta beberapa dokumen lainnya. ■

apr/sf



Tim Kunker Mahkamah Kehormatan Dewan DPR berfoto bersama jajaran Kejaksaan Tinggi Jabar

Foto: Ayu/oc

MKD Perlu Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Muhammad Syafi'i menjelaskan, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam menjaga keluhuran martabat dewan, MKD dapat bekerja sama dengan lembaga lain, termasuk aparat penegak hukum. Meski demikian, pihaknya tidak akan saling mengintervensi terhadap perkara yang tengah ditangani keduanya.

Syafi'i menambahkan, MKD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dapat bekerja sama dengan lembaga lain, sebagaimana ketentuan pasal 122A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

"Kerja sama di sini dapat dilakukan terutama dengan lembaga yang terdapat irisan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Salah satu lembaga yang sering terdapat irisan dalam pelaksanaan tugas adalah lembaga penegak hukum, yang

diantaranya adalah Kepolisian RI dan Kejaksaan," jelas Syafi'i, atau yang akrab disapa Romo ini saat kunjungan kerja MKD DPR RI ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kamis (12/7).

Oleh karena itu, lanjut Romo, MKD perlu terus melakukan sosialisasi ke seluruh aparat penegak hukum. Salah satunya untuk memudahkan bagi MKD dalam penyelidikan, mendapatkan informasi dan mendapatkan data, serta memanggil pihak-pihak penegak hukum untuk menjadi saksi dalam rangka menyelesaikan perkara atas diri Anggota DPR RI, baik perkara aduan atau tanpa aduan.

"Tanpa sosialisasi yang merupakan salah satu bentuk pencegahan ini, mungkin aparat penegak hukum di daerah tidak paham jika suatu saat mereka dipanggil dan harus memberikan data dan informasi yang diperlukan terkait perkara pelanggaran kode etik yang sedang ditangani MKD atas diri seorang Anggota DPR RI misalnya," papar Romo.

Selain itu, politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini juga meminta bantuan aparat penegak hukum di daerah jika ada Anggota DPR RI di daerah pemilihannya (Dapil) yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum, maka tidak segan-segan untuk melaporkannya ke MKD. MKD memiliki sistem penegakan kode etik.

"Melanggar hukum maka sudah pasti terjadi pelanggaran kode etik. Namun pelanggaran kode etik belum tentu terjadi pelanggaran hukum. Misalnya, ada Anggota DPR RI yang ketahuan 'dugem' di salah satu diskotik. Tidak ada pelanggaran hukum di situ, namun saat itu terjadi pelanggaran kode etik," tegasnya.

Meski demikian, Anggota Komisi III DPR RI itu meyakini bahwa pihaknya tidak akan saling mengintervensi. Baik itu terkait proses hukum yang tengah dilakukan aparat penegak hukum. Maupun proses penegakan kode etik yang tengah dilakukan oleh MKD terhadap diri seorang Anggota DPR RI. ■ ayu/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan kehormatan Wakil Ketua Parlemen Bahrain di Gedung DPR, Selasa (17/7) Foto : Jayadi



Raker Komisi V DPR dengan Menteri PUPR dipimpin Ketua Fary Djemy Francis perihal RUU tentang Sumber Daya Air, Rabu (18/7) Foto : Eno



Tim Biro Pemberitaan Parlemen Bagian Penerbitan Setjen dan BK DPR RI melakukan monitoring pendistribusian Buletin dan Majalah Parlementaria ke Dinas Perpustakaan Kota Makassar dan Perpustakaan Univ. Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. (16-19/7) Foto : Dok. Penerbitan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Mau motor
Zaman now?

IKUTI LOMBA
KRITIK TERBAIK DPR

KIRIM MEME & ESSAY
MEME (gambar, karikatur, video)
ESSAY maksimal 500 kata

MASA PENGIRIMAN KARYA:
19 APRIL - 15 AGUSTUS 2018
PENGUMUMAN 29 AGUSTUS 2018

PEMENANG UTAMA: Motor Zaman Now
Juara I Rp 10 juta, Juara II, Rp 7 juta,
Juara III Rp 5 juta

KIRIM KE: SAAT PENGUMUMAN
DILANGSUNGKAN LOMBA STAND UP COMEDY

- lombakritikterbaikDPR@gmail.com
- lombakritikterbaikDPR@yahoo.com
- [@LombaKritikTerbaikDPR](https://www.instagram.com/LombaKritikTerbaikDPR)
- [@LombaKritikDPR](https://twitter.com/LombaKritikDPR)
- [@lombakritikterbaikDPR](https://www.facebook.com/lombakritikterbaikDPR)